

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa Negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakan dalam seluruh perundangan-perundangan. Mengenai hal itu, Kirdi Dipoyudo (1979:30) menjelaskan “Negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan dan dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak azasi semua warga bangsa Indonesia (kemanusiaan yang adil dan beradab), agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin, memajukan kesejahteraan umum, yang kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa (keadilan sosial).”

Fenomena sekarang ini, bangsa Indonesia tidak percaya dengan pancasila. Atau *pe-marginal-an* Pancasila dari kehidupan bangsa ini. Padahal implementasi Pancasila dapat menjadi media dan sarana interaksi yang efektif pengkayaan pandangan, pendapat dan pemikiran. Guna merumuskan konsep sosialisasi dan implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sasaran dan metodologi menjadi sangat penting mengingat realisasi

dinamika kehidupan yang ada saat ini yang diwarnai oleh berkembangnya nilai-nilai demokrasi dalam proses demokratisasi yang terus berlanjut.

Sejak era reformasi sampai sekarang perubahan terjadi dengan begitu cepat dan menghasilkan dampak negatif maupun positif dan sangat berpengaruh dalam sistem pemerintahan negara kita. Dinamika perubahan tersebut membawa pergeseran nilai-nilai pranata kehidupan sosial dan politik ditengah masyarakat baik secara individu maupun kelembagaan.¹

¹ C.T.S Kansil, *Haluan Politik Negara Indonesia*. Penerbit Erlangga, Jakarta. Cetakan keempat. 1987. h. 75

Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat. Pembukaan UUD 1945 dan sebagaimana tertuang dalam memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 yang menandakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar Negara Republik Indonesia. Memorendum DPR-GR itu disahkan pula oleh MPR/1973 dan Ketetapan No.XX/MPRS/1966. Ketetapan MPR No. V/ MPR/1973 dan ketetapan MPR/No.IX/MPR/1978 yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum Indonesia.¹

Pancasila sebagai dasar maka terlebih dahulu perlu dibahas asal kata dan istilah "Pancasila" yang berasal dari bahasa Sansekerta dari India (bahasa kasta Brahmana), adapun bahasa rakyat biasa disebut bahasa Prakerta.

Perkataan Pancasila mula-mula terdapat dalam perpustakaan Budha dalam kitab Tripitaka di mana dalam ajaran Buddha tersebut terdapat aturan (larangan) atau *Five moral principle* yang harus ditaati para penganut Budha untuk mencapai nirwana/surga melalui pancasila yang isinya lima. Secara **etimologis** istilah "Pancasila" yang berasal dari bahasa Sansekerta Menurut Moh. Yamin, dalam bahasa Sansekerta perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu Panca artinya lima, Syila artinya batu sendi, alas, atau dasar, Syilla artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh.

Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa Jawa diartikan “susila” yang memiliki hubungan dengan moralitas, oleh karena itu secara etimologis kata “Pancasila” yang dimaksudkan adalah istilah “Pancasyila” dengan *vocal* i pendek yang memiliki makna leksikal “berbatu sendi lima” atau secara harfiah “dasar yang memiliki lima unsur.”

Istilah pancasila dikenal sejak zaman Majapahit pada abad XIV yang terdapat dalam buku Nagara Kertagama Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular, dalam buku Sutasoma ini, selain mempunyai arti Berbatu sendi yang lima (dari bahasa Sansekerta) Pancasila juga mempunyai arti “Pelaksana kesusilaan yang lima” (Pancasila Krama), yaitu sebagai berikut:

1. *Panati pada veramani sikhapadam samadiyani* artinya tidak boleh membunuh.
2. *Dinna dana veramani shikapadam samadiyani* artinya tidak boleh mencuri.
3. *Kameschu micchara veramani shikapadan samadiyani* artinya, tidak boleh berzina.
4. *Musawada veramani shikapadan samadiyani* artinya, tidak boleh berdusta.
5. *Sura meraya masjja pamada tikana veramani* artinya, tidak boleh mabuk minuman keras/obat-obat terlarang. (Zainal Abidin, 1958:36).

Dengan masuknya kebudayaan India ke Indonesia melalui penyebaran agama Hindu dan Budha, maka ajaran “Pancasila” Budhisme pun masuk kedalam kepustakaan Jawa, terutama pada zaman Majapahit. Perkataan “Pancasila” dalam khazanah kesusastraan nenek moyang kita zaman keemasan keprabuan Majapahit di bawah Raja Hayam Wuruk dan Majapahitnya Gajah Mada, dapat ditemukan dalam keropak Negarakertagama, yang berupa kakawin (syair pujian) dalam pujangga istana bernama Empu Prapanca yang selesai di tulis pada tahun 1365, di mana dapat kita temui dalam sarga 53 bait ke 2 yang berbunyi “*Yatnaggegawani pancasyiilakertasangkarbbisekak krama*” yang artinya Raja menjalankan dengan setia keliam patung pantangan (Pancasila), begitu pula upacara-upacara ibadat dan penobatan-penobatan.¹

Dalam pembagian Pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia

Kemudian sejauh ini telah diketahui dua corak sikap dan tingkah laku politik manusia Indonesia, **corak pertama** sebagaimana terlihat pada sebagian penting golongan elite strategis, ialah kecenderungan untuk bersikap dan bertingkah laku memonopoli kebenaran yang menjurus kepada kemungkinan lahirnya mentalitas otoriter/totaliter. **Corak kedua** ialah yang terlihat dalam sikap dan tingkah laku politik sebagian besar anggota masyarakat yang masih berwarna emosional-primordial. Corak ini memperkuat corak pertama. Kalau diteliti lebih dalam, corak pertama juga memperkuat corak kedua. Dengan begitu kedua corak sikap dan tingkah laku politik itu saling memperkuat. Dari kombinasi keduanya muncul pola sikap dan tingkah laku politik yang menjurus kepada feodalisme yang selanjutnya dapat melahirkan otoriter/totaliter. Dari sini mungkin mulai terlihat bagaimana kesenjangan antara pola sikap dan tingkah laku politik yang dikehendaki demokrasi pancasila dengan kenyataan yang

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara RI, yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia.

Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 yang menandakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipaparkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Memorandum DPR-GR itu disahkan pula oleh MPRS dengan ketetapan No. IX/MPR/1978 yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum di Indonesia.

berlaku sehari-hari di dalam masyarakat. Adanya dua corak sikap dan tingkah laku politik yang berbeda dalam masyarakat yang sudah tentu menyulitkan realisasi demokrasi Pancasila yang pada dasarnya menghendaki adanya pola sikap dan tingkah laku politik yang sama bagi seluruh anggota masyarakat. Bertambah sulit lagi ketika kedua corak sikap dan tingkah laku politik yang berlaku juga masih jauh dari pada sifat demokrasi, kalaulah tidak dapat dikatakan bertentangan.²

Krisis politik yang menghinggapi para penyelenggara pemerintah, yaitu maraknya KKN di mana-mana dari pusat sampai daerah; Kekerasan, politik uang dan korupsi mendominasi warna kehidupan politik di Indonesia. Tragedi yang menimpa warga Ahmadiyah, syiah, dan konflik agama yang sering terjadi menodai harmoni kehidupan berbangsa . kekerasan lebih kejam lagi berlangsung dalam konflik antaretnis dan antaragama. Itu semua meninggalkan korban, trauma, pengungsian, penderitaan yang berkepanjangan. Semua kekerasan itu bukan tindak spontan atau peristiwa insidental belaka. Peristiwa-peristiwa tragis itu tidak lepas dari praktik politik kekuasaan kelompok tertentu.

Sulit untuk tidak mengaitkan tragedi-tragedi tersebut dengan pertarungan untuk kekuasaan. Namun, rekayasa politik tidak akan memancing kekerasan segampang itu kalau tidak ada masalah-masalah yang sudah melilit kelompok-kelompok dalam

² Alfian, *Politik Kebudayaan Politik Manusia Indonesia, LP3ES, 1981, h. 146-147*

masyarakat bagaikan api dalam sekam: masalah ketidakadilan dan kebencian korban ketidakadilan itu konkret, yaitu orang-orang miskin dan kaum marjinal. Kesenjangan ekonomi telah meminggirkan mereka dalam bentuk putus sekolah, pengangguran, penggusuran, dan kemiskinan. Peminggiran itu memancing radikalitas dalam menuntut keadilan. Proses radikalisasi mencuat karena kesadaran yang semakin dalam sebagai korban. Identitas korban ini semakin mengkristal ketika agama menawarkan pendasaran ideologis. Situasi penuh frustrasi itu diperparah oleh kebencian antara pemeluk agama. Kebencian itu memang ada dan sungguh dirasakan. Prasangka-prasangka buruk terhadap pemeluk agama lain sungguh hidup dan sering diembuskan oleh pihak tertentu, kendati banyak juga yang menjalin kerja sama dan membangun dialog.

Ketika peristiwa-peristiwa kekerasan itu mulai mereda, yang mencuat ke permukaan adalah politik uang dan korupsi. Politik uang mempunyai tujuan kekuasaan, dan pada gilirannya kecenderungan kekuasaan adalah semakin memperkokoh dominasi, yang tentu saja membutuhkan fasilitas penopangnya, terutama ekonomi. Jadi, korupsi tidak bisa dilepaskan dari penyalahgunaan kekuasaan. Yang terakhir ini begitu mudahnya terjadi karena tatanan politik yang ada sangat lemah dalam mekanisme kontrol.³

³ Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2014. h. 4.

Berbagai kerusuhan yang terjadi akhir-akhir ini, tak pelak lagi, bisa membawa perubahan dalam struktur politik di atas. Hal ini didasarkan atas beberapa pertimbangan berikut. *Pertama*, kerusuhan tersebut adalah salah satu konsekuensi logis dari model *polity* yang berlaku sampai saat ini, khususnya karena ketidaksetaraan antara negara dan masyarakat. *Kedua*, kendati berbeda-beda motivasi dan penyulutan, semua kerusuhan yang terjadi mempunyai dimensi politik yang sama, yaitu kelangkaan sumber politik masyarakat bawah. *Ketiga*, jika kerusuhan-kerusuhan itu berkecamuk terus, ia dapat mempengaruhi kinerja ekonomi secara makro, yang berarti mengganggu akselerasi pembangunan yang menjadi salah satu landasan legitimasi.⁴

Padahal, politik ada karena masyarakat berselisih pendapat. Mereka berselisih dalam bagaimana mereka harus menjalani kehidupan. Mereka juga berselisih tentang bagaimana masalah seperti itu seharusnya dipecahkan. Menurut Aristoteles, hal ini menjadikan ilmu politik sebagai ‘ilmu pengetahuan pokok’: yaitu segala aktivitas di mana manusia berusaha untuk meningkatkan kehidupan mereka dan menciptakan masyarakat yang baik. Dan yang terpenting, politik adalah sebuah aktivitas sosial. Ia selalu merupakan dialog dan tidak pernah sebagai monolog. Individu yang menyendiri seperti Robinson Crusoe mungkin dapat mengembangkan sebuah ekonomi yang sederhana,

⁴ Muhammad A.S Hikam, *Politik Kewarganegaraan (Landasan Redemokrasi di Indonesia, PT. Erlangga, Jakarta, Cetakan kedua, 1999. h.63.*

menghasilkan karya seni dan sebagainya, tetapi mereka tidak dapat terlibat dalam politik.⁵

Politik riil adalah pertarungan kekuatan.⁶ Hal ini dapat dilihat saat musim kampanye (pemilu) tiba. Pemilu diyakini sebagai sarana yang paling demokratis untuk memilih elit politik. Karena sifatnya yang demokratis, maka kegiatan Pemilu selamanya mengikutsertakan mayoritas penduduk berhak memilih. Dalam pemilu para pemilih bebas menentukan siapa yang dipilih, dan para calon elit juga bebas mengumbar janji untuk menarik massa sebanyak mungkin. Suasana memang mirip pasar, hiruk pikuk oleh suara orang menawarkan barang, yang tertarik ataupun tidak percaya akan tawaran yang diajukan. Suasana macam di atas sudah terlihat sejak tahun 1971.⁷

Menjadi jelas sekarang bahwa kampanye Pemilu, yang tujuannya menarik suara sebanyak mungkin, tidak sekedar melibatkan rakyat dalam berpikir. Keterlibatan emosional terhadap partai atau tokoh yang ditampilkan, sering memainkan peranan kunci bagi keputusan seseorang untuk memilihnya.⁸ Hal ini dapat dilihat dalam musim kampanye, jalan-jalan dipenuhi atribut-atribut peserta Pemilu. Mobilisasi massa tetap dilakukan setiap parpol dengan mengadakan rapat besar di gedung tertutup.

⁵ Andrew Heywod, *Politik (edisi keempat), Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2014. h. 1.

⁶ Haryatmoko, *op. cit.*, h. 7.

⁷ Riswanda Imawan, *Membedah Politik Orde Baru, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 1997. h. 3

⁸ *Ibid.*, h. 5

Di sana juru kampanye berusaha mempengaruhi konstituen dengan janji-janji kampanye. Sejumlah artis nasional maupun lokal ditampilkan agar lebih mendatangkan banyak orang. Rapat kabar didahului dan diakhiri dengan arak-arakan yang memacetkan jalan-jalan. Pertarungan menarik hati pemilih sesungguhnya terjadi di media massa. Dalam hal pemberian, partai politik berusaha agar setiap kegiatan kampanyenya mendapat liputan luas di media masa dan menimbulkan citra positif partai.⁹

Fungsi partai politik yang paling mendasar adalah mengarah pada formulasi dan implementasi kebijakan publik yang akan mengatur masyarakat. Dikatakannya bahwa partai politik juga merupakan pengorganisasian warga negara yang menjadi anggotanya untuk bersama-sama memperjuangkan dan mewujudkan negara dan masyarakat yang dicita-citakan. Karena itu, partai politik merupakan media atau sarana partisipasi warga negara dalam penentuan siapa yang menjadi penyelenggara negara pada berbagai lembaga negara di pusat dan daerah.¹⁰

Partai politik membentuk pemerintahan atau menjadi kekuatan oposisi di parlemen. Mereka bisa juga menempati eselon-eselon tinggi dalam birokrasi. Maka disinilah partai politik memainkan peranan krusial dalam pengambilan keputusan

⁹ Budi Setiyono, *Iklan Dan Politik Menjaring Suara dalam Pemilihan Umum, AdGoal dot Com*, Jakarta, Cetakan Pertama, 2008. h. 134

¹⁰ Fadilah Putra, *Partai Politik dan Kebijakan Publik (Analisis terhadap kongruensi janji politik partai dengan realisasi produk kebijakan publik di Indonesia 1999-2003)*, Yogyakarta, 2003. h. 15.

implementasinya. Pada titik inilah partai politik menjadi garda terdepan dalam demokrasi, ia harus dapat tampil sebagai kekuatan perekat kesenjangan politik yang ada pada relasi negara-rakyat yang selama ini terdapat dispartis.¹¹

Melihat realita yang ada, orientasi politik Indonesia bukan lagi memikirkan bagaimana penguasa mengatur tata hidup bersama, melainkan bagaimana penguasa mengatur tata pemerintahan sedemikian rupa sehingga ia tetap dicintai, dikagumi dan diandalkan rakyatnya. Politik Indonesia lebih memikirkan bagaimana kekuasaan dipertahankan selama mungkin daripada bagaimana Indonesia dibangun sebaik mungkin. Cara berpikir seperti ini sejalan dengan konsep politik modern Machiavelli.

Dalam buku *The Principe* bab IX, Machiavelli memberikan saran untuk para penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya dengan cara menarik hati dan simpati rakyat. Terlihat jelas pada masa orde baru, Soeharto menjabat menjadi presiden RI selama 32 tahun. Bukan hanya tingkat eksekutif, melainkan para pejabat di pusat hingga daerah, mereka (politisi) menjadi anggota legislatif sekian periode, dengan dalih atas kepentingan rakyat. Seperti pada era orde baru. Di bawah kepemimpinan Soeharto Indonesia pernah memiliki beberapa kebijakan yang kental dengan argument Machiavelli yang mengatakan bahwa: “Politik harus dipisahkan dari etika dan moral”. Salah satu kebijakan tersebut adalah adanya larangan

¹¹ *Ibid.*, h. 7

penggunaan jilbab untuk siswa sekolah negeri, tahun 1990an. Hal ini merupakan upaya untuk memisahkan kehidupan politik dengan agama, dimana salah satu ciri dari pemikiran Machiavelli di era renaissance adalah juga tentang sekularisme. Tentu, pendapat atau beberapa ajaran politik Machiavelli ini banyak mendapat tentangan, karena dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa tertentu.¹²

Berangkat dari itu semua maka penulis berusaha menggali pemikiran Machiavelli tentang politik dan relevansinya di Indonesia menggunakan kajian filsafat politik. Penulis berusaha mencari tahu bagaimana perilaku politik di Indonesia jika dilihat dalam kajian filsafat politik Machiavelli. Maka dari itu penulis mengambil judul *ANALISIS PERILAKU POLITIK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT POLITIK NICCOLO MACHIAVELLI*.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Perilaku Politik di Indonesia pasca Reformasi?
2. Bagaimana Perilaku Politik di Indonesia menyikapi nilai-nilai etika?
3. Bagaimana Perilaku Politik di Indonesia dalam perspektif filsafat politik Niccolo Machiavelli?

¹²Eppofahmi. 2013. *Behaviour Machiavellian in Indonesia*. Retrieved on 5 September 2015 from [http:// fahmisme.wordpress.com](http://fahmisme.wordpress.com)

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Agar penelitian skripsi ini memiliki signifikansi yang jelas, maka penulis memandang perlu untuk membuat dan mencantumkan tujuan tertentu dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui perilaku politik manusia di Indonesia
- b. Untuk mengetahui nilai-nilai etika dalam perilaku politik di Indonesia
- c. Untuk mengetahui bagaimana perilaku politik di Indonesia dalam perspektif filsafat politik Niccolo Machiavelli

2. Manfaat Penelitian

Dalam penyusunan skripsi, pencantuman tujuan tidak lengkap apabila tidak disertai dengan kemanfaatan penelitian di dalamnya. Bagi penulis, pencantuman kemanfaatan dalam penelitian bukan sekedar bentuk pembuktian atas urgensi serta aplikasi tentang suatu hal yang dikaji, melainkan juga merupakan bentuk pengharapan dan tekad kuat penulis atas adanya implikasi positif bagi para pembaca skripsi ini nantinya. Adapun manfaat penulisan yang penulis rumuskan adalah sebagaimana berikut:

- a. Secara teori, penelitian dalam skripsi ini akan memberikan tambahan wawasan terhadap para pembaca tentang politik di Indonesia dan pemikiran seorang Filosof politik, yakni Niccolo Machiavelli.

- b. Secara praktis, memberikan peluang kepada para pembaca agar dapat memberikan penilaian secara objektif dan ilmiah terhadap tepat atau tidaknya bahwa politik Indonesia saat ini berkiblat pada pemikiran Machiavelli.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pengamatan yang telah penulis lakukan, ada beberapa penulis lain yang membahas mengenai Niccolo Machiavelli. Tetapi, tema besar pembahasan tentang Machiavellian di Indonesia belum pernah disinggung secara tuntas oleh para peneliti. Kalaupun ada, hanya sekilas dijelaskan oleh Haikal Mujahid dalam laporan penelitiannya yang diajukan untuk mendapat Gelar Sarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul Etika dan Kekuasaan: Pemikiran Niccolo Machiavelli Atas Etika Dan Kekuasaan Dalam Ranah Politik.

Dalam penelitian Haikal Mujahid, penulis menjelaskan tentang konsep etika yang dikenalkan oleh Machiavelli disini menjelaskan bahwa seorang penguasa seharusnya memiliki dua sifat gabungan antara ditakuti dan dicintai, dan memiliki etika yang bermartabat agar disegani rakyat. Di penelitian itu ditulis bagaimana Machiavelli juga memberikan siasat agar kekuasaan bisa dipertahankan, dan negara tetap stabil. Machiavelli mengingatkan agar itu semua dilakukan jangan semata-mata untuk kepentingan pribadi, tapi itu semua untuk kepentingan negara. juga dijelaskan tentang sistem negara ideal menurutnya yang dapat

menopang kestabilan kekuasaan adalah negara dengan bentuk republik.¹³

Kafa Bihi Zaqi juga meneliti pemikiran Machiavelli yang berjudul SANG PENGUASA: (Telaah Pemikiran Niccolo Machiavelli: Sebuah Realisasi Hegemonik). Dalam penelitiannya itu, Kafa Bihi Zaqi lebih membedah buku karya Niccolo Machiavelli yang berjudul *The Prince* (Sang Pangeran). Dijelaskan dalam penelitiannya mengenai Sang Penguasa yang merupakan ikon penguasa ideal yang mampu bertindak secara sempurna melampaui batas-batas etika dan moral sebagai sebuah tuntutan alamiah dalam dunia politik. Sang Penguasa adalah sosok yang diharapkan hadir ketika realitas politik tidak mampu dibendung, bahkan oleh konsep-konsep ideal - normatif-imaginer dari politik itu sendiri. Instabilitas politik merupakan latar kontekstual hadirnya semua gambaran ini, dengan satu asumsi, terpuruk serta pecahnya kesatuan sosial dan politik hanya dapat ditanggulangi dengan terpusatnya segala unsur dan elemen di bawah satu otoritas yaitu Sang Penguasa.

The Prince adalah buku karya Niccolo Machiavelli, sebuah karya yang berisi konsep suntuk menjadi seorang penguasa yang mampu bertindak secara efektif dan mengakar bagi besar dan bersatunya negara serta keagungan Sang Penguasa itu sendiri.

¹³ Haikal Mujahid, *Etika Dan Kekuasaan: Pemikiran Niccolo Machiavelli atas Etika dan Kekuasaan dalam Ranah Politik*, Yogyakarta, 2011.

Dalam konsepnya, Machiavelli menyodorkan secara jelas nasehat bagaimana kekuasaan dapat dipusatkan di satu tangan penguasa, dengan mengurai tata cara pemerintahan kerajaan yang diperlukan, alat apa yang dipakai memperkuat negara, kebijakan apa yang dipakai memperbesar kekuasaan dan sekaligus cara-cara menyelamatkan diri dari proses kemunduran kekuasaan.

Tindakan kekejaman politik dan tindakan militer demi kekuasaan adalah dibenarkan. Dalam garis besarnya kekuasaan merupakan kemampuan dari subjek dalam mempengaruhi objek, sehingga tingkah laku objek-objek akan sesuai dengan keinginan dari subjek pemegang kekuasaan. Penguraian jaring-jaring kuasa dari subjek, dalam ekspresinya selalu tidak dapat dilepaskan dari dua unsur yaitu, kekuatan kekerasan dan hegemoni sebagai suatu entitas yang melekat. Dalam menelaah konsep Sang Penguasa dari Machiavelli, dalam skripsi ini penulis menggunakan pula pendekatan konsep hegemoni "ala" Antonio Gramsci dengan satu alasan bahwa dalam perspektif Gramscian terkedepankan nuansa terminimalisirnya kekerasan (koersi) dan termaksimalkannya hegemoni sebagai sebuah organisasi konsensus yang di dalamnya terjadi hubungan persetujuan dari kelompok sub-ordinat atas subordinasi mereka bagi kelanggengan kekuasaan itu sendiri. Dari landasan-landasan tersebut - sebagai target maksimal - akan dipahami hakekat dari Sang Penguasa secara lebih esensial. Bahwa Sang Penguasa sebagai titik integral dari sebuah kekuasaan,

mampu secara efektif dan maksimal meraih serta mempertahankan kekuasaan dengan meminimalkan kekerasan.¹⁴

E. Metode Penulisan

Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah *Library research* yaitu metode penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan datanya dengan memanfaatkan berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian baik dari buku-buku teks, media masa, ataupun jurnal, yang membicarakan tentang subjek yang di tuju. Namun yang perlu diperhatikan adalah unsur selektif yaitu tidak semua unsur bacaan yang ditemukan lalu ditelaah dan dipakai begitu saja, agar didapatkan hasil penelitian yang relevan dan tidak meluas kemana-mana. Kajian inipun sering juga disebut kajian literatur.¹⁵

Penelitian tokoh ini juga bersifat kualitatif yang berangkat dari generalisasi empiris atau realitas-realitas sosial sejarahnya. Realitas-realitas tersebut dideskripsikan dan di analisis secara komprehensif, *holistic*, dan komparatif. Aspek yang bersifat fenomenal dan historis juga dideskripsikan dan ditelaah secara kritis hingga melahirkan satu generalisasi yang bersifat ideografis.

¹⁴ Kafa Bihi Zaqi, *Sang Penguasa: (Telaah Pemikiran Niccolo Machavelli: Sebuah realisasi Hegemonik)*, Yogyakarta, 2013.

¹⁵ Mohamad Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, UIN Press, Malang, 2008. h. 111

Menurut Bogdan dan Taylor (1973),¹⁶ penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri. pendekatan ini menunjukkan langsung dari setting itu secara keseluruhan. Subjek studi baik berupa organisasi, lembaga atau individu tidak dipersempit menjadi variable yang terpisah atau menjadi hipotesis, tetapi dipandang sebagai bagian dari suatu keseluruhan (*holistic*).

Strategi penelitian menggunakan studi tokoh kritis yang merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif. Dalam studi tokoh kritis, metode yang digunakan untuk meneliti subjek penelitian akan mempengaruhi cara pandang subjek tersebut. Sehingga studi tokoh kritis terletak pada kapasitas untuk menganalisa dan menginterpretasi tokoh Machiavelli secara kritis. Melalui metode ini juga, dapat dikenali secara mendalam bagaimana sang tokoh secara pribadi dengan melihat konsep dia, sesuai dengan cara pandangnya terhadap dunia dengan pemikiran, karya dan perilaku politiknya. Penelitian kualitatif ini mencoba menggeneralisasi tokoh Niccolo Machiavelli, dari sisi pemikiran politiknya.

Oleh karena itu, kajian literatur kritis yang baik menjadi prasyarat wajib bagi setiap penelitian, baik untuk penjabaran atau mempertajam permasalahan, merumuskan hipotesis, merumuskan

¹⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Farian Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001. h. 31

konsep-konsep, menentukan dasar-dasar teori yang dipergunakan dalam mengumpulkan data, maupun dalam menafsirkan data. Penelitian kepustakaan ini diperoleh dengan melakukan penalaran deduktif secara simultan dari sumber-sumber bacaan yang diperoleh. Jadi, penelaahan ini tidaklah hanya memindahkan buah pemikiran orang lain secara dogmatis tetapi, memerlukan proses berpikir seorang peneliti agar terhindar dari unsur menjiplak.

F. Sistematika Penulisan

Demi menghasilkan skripsi penelitian yang indah dan pemahaman yang komprehensif bagi para pembaca, maka penulis perlu menyusun kerangka penulisan skripsi penelitian ini dengan sistematika sebagaimana berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada BAB ini, berisi tentang latar belakang, yang sedikit-banyak berisi tentang isi hati si penulis, sehingga penulis terdorong untuk mengkaji tentang pemikiran filosof Niccolo Machiavelli di bidang Politik serta kondisi politik di Indonesia. Dalam pendahuluan ini, penulis juga menguraikan beberapa sub. Bab yang berisi tentang rumusan masalah yang akan peneliti targetkan untuk diselesaikan dalam skripsi ini. Tidak lupa penulis jelaskan juga tujuan manfaat skripsi bagi para pembaca. Dan, penulis juga menyertakan bukti keaslian skripsi ini dengan sederet pembuktian yang terangkum dalam tinjauan pustaka. Selanjutnya, penulis menjelaskan tentang metode penelitian yang menggunakan analisis kritis dan kajian pustaka (*Library Riset*).

Poin terakhir dalam bab ini adalah sistematika penulisan sebagai kerangka penulisan skripsi.

BAB II Pemikiran Politik Machiavelli. Penulis juga mencantumkan sub. BAB yang memuat biografi Machiavelli, Filsafat Politik Machiavelli, Politik dan Agama menurut Machiavelli, Kekuasaan dan Masyarakat di masa Machiavelli, serta Kekuasaan dan Tataan Negara di masa Machiavelli.

BAB III deskripsi tentang corak politik di Indonesia, adapun sub. BAB yang penulis muat, yaitu Landasan Politik Indonesia, Landasan Konstitusi Indonesia, Politik Indonesia di Era Reformasi, Kebebasan Berpolitik di Indonesia, Partai Politik di Indonesia, serta perilaku para anggota legislatif yang tidak Religius, tidak Nasionalis, dan tidak Humanis.

BAB IV Analisis perilaku politik di Indonesia dalam teori filsafat politik Machiavelli (sebuah kajian filsafat politik). Bab ini berisi tentang pergulatan analisis yang bersumber dari bab II dan bab III. Penulis mencoba mencari kesesuaian pemikiran Politik Machiavelli dengan kondisi politik di Indonesia.

BAB V PENUTUP, berisi Kesimpulan, Saran, dan Penutup yang merupakan hasil refleksi akhir penulis berdasarkan uraian-uraian dalam pembahasan sebelumnya secara keseluruhan.